

MANAJEMEN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM MELALUI IMPLEMENTASI APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS JAMBI

Sigit Indrawijaya¹⁾, Pradita Eko Prasetyo Utomo²⁾, Dawam Suprayogi³⁾

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Kota Jambi¹⁾

Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Kota Jambi²⁾

Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Kota Jambi³⁾

e-mail: sigit_indra@unja.ac.id¹⁾, pradita.eko@unja.ac.id²⁾, dawamsuprayogi@unja.ac.id³⁾

Abstrak

Teknologi informasi berperan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan e-government. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi sarana utama dalam menyediakan akses terhadap produk hukum, baik di tingkat nasional maupun perguruan tinggi. Universitas Jambi perlu mengembangkan JDIH berbasis web untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan keterbukaan informasi publik. Sistem ini memungkinkan akses cepat terhadap Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, SOP, dan kebijakan universitas yang menjadi acuan dalam tata kelola dan tridharma perguruan tinggi. Digitalisasi dokumen hukum memungkinkan pengelolaan dan pengarsipan lebih efisien, mengurangi keterlambatan dalam distribusi kebijakan, serta meningkatkan transparansi bagi pihak internal dan eksternal. Dengan demikian, penerapan JDIH berbasis teknologi informasi dapat mendukung tata kelola universitas yang lebih modern, efektif, dan akuntabel.

Kata kunci: JDIH, Produk Hukum, Sistem Informasi

Abstract

Information technology plays a vital role in legal development in Indonesia, including the implementation of e-government initiatives. The Legal Documentation and Information Network (JDIH) serves as a primary medium for providing access to legal documents at both the national and institutional levels. Jambi University needs to develop a web-based JDIH to enhance bureaucratic efficiency and public information transparency. This system enables quick access to Rector Regulations, Rector Decrees, Standard Operating Procedures (SOPs), and university policies, which serve as references for governance and the university's threefold mission (Tridharma). The digitalization of legal documents facilitates more efficient management and archiving, reduces delays in policy dissemination, and improves transparency for both internal and external stakeholders. Therefore, the implementation of an information technology-based JDIH can support more modern, effective, and accountable university governance.

Keyword: Legal Documentation and Information Network, Legal Products, Information System

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pikir dan perilaku manusia, menciptakan era di mana ketergantungan terhadap teknologi informasi semakin tinggi. Transformasi digital yang

terjadi saat ini menjadi salah satu bentuk revolusi teknologi informasi yang berdampak luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan (Rahman, 2016). Teknologi informasi berperan sebagai sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan hukum di Indonesia. Pembangunan hukum, baik dalam konteks pembuatan produk hukum daerah, peningkatan kapasitas aparat hukum, maupun penerapan kebijakan, memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai agar dapat berjalan secara optimal. Sebagai suatu sistem yang kompleks, pembangunan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai elemen yang berkontribusi di dalamnya. Pendekatan sistematis ini diperlukan agar percepatan pembangunan berbasis teknologi informasi dalam sektor hukum dapat terwujud secara efektif. Universitas Jambi, sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, memiliki peran strategis dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, termasuk di bidang hukum (Alfajri et al., 2022).

Salah satu aspek penting dalam digitalisasi hukum adalah penerapan e-government, yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1990-an (Makarim, 2015). E-government mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini, hampir seluruh organisasi pemerintah telah memiliki media pelayanan berbasis teknologi komunikasi dan informatika (TIK). Salah satu bentuk implementasi e-government dalam bidang hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH berperan penting dalam menyediakan akses informasi hukum yang cepat dan akurat kepada masyarakat luas. JDIH berfungsi sebagai sistem dokumentasi hukum yang memungkinkan akses publik terhadap dokumen produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, serta pedoman hukum lainnya. Sistem ini sebanding dengan konsep *legislation online*, *statutes online*, atau *acts online* yang diterapkan di berbagai negara. Pemerintah pusat telah banyak mengembangkan situs web yang menyediakan akses terhadap dokumen hukum, seperti setneg.go.id, kemendagri.go.id, dan komdigi.go.id, guna meningkatkan transparansi hukum di tingkat nasional. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, termasuk di bidang hukum, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan. Hal ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan informasi hukum yang dapat diakses dengan mudah dan cepat (Herawati et al., 2023).

Sejalan dengan implementasi JDIH di tingkat nasional, perguruan tinggi juga telah mengadopsi sistem ini untuk mendukung tata kelola akademik dan administratif. Hampir seluruh perguruan tinggi telah menyediakan situs web khusus JDIH guna mendokumentasikan produk hukum internal yang mencakup Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, Pedoman dan Kebijakan Universitas, serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Universitas Jambi, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, juga perlu mengembangkan Aplikasi Dokumentasi Produk Hukum dan Keterbukaan Informasi Publik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola dokumen hukum universitas. Pemanfaatan sistem perkantoran elektronik dan implementasi aspek human resources menjadi prasyarat penting dalam pengembangan e-local government (Mudjiyanto, 2014). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pengelolaan produk hukum, sekaligus memastikan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterapkannya sistem JDIH berbasis web, proses birokrasi di lingkungan Universitas Jambi diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Dalam sistem konvensional, pengambilan salinan dokumen hukum yang telah disahkan membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun, melalui sistem informasi berbasis web, dokumen hukum dapat diunggah secara digital dan diakses oleh seluruh unit di universitas dalam waktu nyata (*real-time*).

Publikasi dokumen hukum secara daring juga memungkinkan aksesibilitas selama 24 jam, sehingga meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam implementasi kebijakan universitas. Universitas Jambi sangat membutuhkan keberadaan sistem informasi yang didukung dengan teknologi informasi, dimana sistem informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Putra et al., 2020).

Pentingnya JDIH juga didukung oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menegaskan bahwa setiap informasi publik harus dapat diakses secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang ringan, dan melalui prosedur yang sederhana. Konsekuensi dari regulasi ini adalah bahwa setiap badan publik, termasuk perguruan tinggi, memiliki kewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi yang efektif agar masyarakat dapat mengakses informasi hukum dengan mudah dan akurat (Febriananingsih, 2012). Pengembangan JDIH berbasis teknologi informasi di Universitas Jambi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, serta mendukung tata kelola universitas yang lebih transparan dan akuntabel. Evaluasi sistem informasi penting untuk menilai efektivitas sistem dan menghindari implementasi yang kurang optimal (Ripanti, 2020).

Regulasi terkait keterbukaan informasi lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Setidaknya, informasi tersebut harus tersedia melalui situs web resmi dan media lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi hukum juga sejalan dengan perkembangan era digital yang menuntut kecepatan dan efisiensi dalam penyebaran informasi. Sosialisasi keterbukaan informasi publik perlu dilakukan secara lebih massif untuk mendorong partisipasi masyarakat (Asgart, 2011).

Selain itu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung sistem hukum di Indonesia. Pertama, JDIH berperan sebagai sarana pendukung pembangunan hukum, yang memungkinkan berbagai dokumen hukum tersusun dengan sistematis dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Kedua, JDIH berfungsi untuk meningkatkan penyebarluasan serta pemahaman pengetahuan hukum, sehingga masyarakat, akademisi, serta aparatur pemerintahan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi hukum yang relevan. Ketiga, sistem ini dirancang untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya, sehingga proses administratif dan pembuatan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akuntabel. Dengan demikian, JDIH menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi, serta efektivitas dalam pengelolaan dokumen hukum di Indonesia.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh negara (Edy, 2017). Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Edy, 2017). Penyusunan dokumen dalam sistem JDIH merupakan bagian dari langkah strategis dalam mengelola produk hukum universitas. Proses ini mencakup pengumpulan bahan hukum, pembuatan abstraksi dokumen, serta digitalisasi

arsip hukum agar lebih mudah diakses dan ditelusuri oleh para pemangku kepentingan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai basis data hukum, tetapi juga sebagai sarana pendukung bagi pengambil kebijakan di lingkungan universitas dalam memastikan keselarasan regulasi dan prosedur akademik maupun administratif. Dengan demikian, implementasi JDIH berbasis teknologi informasi di Universitas Jambi dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola universitas yang baik dan transparan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Jambi menghasilkan berbagai produk hukum untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan akademik dan manajemen kelembagaan. Produk hukum ini menjadi acuan utama bagi seluruh unit dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain menjadi instrumen tata kelola internal, JDIH juga memiliki peran strategis dalam keterbukaan informasi bagi pihak eksternal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan dokumen hukum yang lebih efektif, modern, dan terdigitalisasi guna meningkatkan efisiensi administrasi serta mendukung keterbukaan informasi publik. Investasi dalam teknologi informasi menjadi sangat penting, terutama bagi institusi yang bergerak di bidang pelayanan dan pendidikan tinggi. Pengelolaan produk hukum melalui implementasi aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis teknologi informasi merupakan langkah strategis untuk mendukung good governance di lingkungan Universitas Jambi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pengembangan Sistem Informasi JDIH berbasis web menjadi suatu langkah strategis dalam mewujudkan efisiensi dalam dokumentasi dan legalisasi produk hukum di Universitas Jambi. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat akses terhadap dokumen hukum, meningkatkan transparansi kelembagaan, serta mendukung tata kelola universitas yang lebih modern dan akuntabel. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengguna untuk mencari dan menelusuri peraturan perundang-undangan, keputusan, serta dokumen hukum lainnya dengan lebih mudah dan cepat (Putra & Setiawan, 2019).

2. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi JDIH

Salah satu bentuk implementasi e-government di Indonesia adalah penyediaan informasi publik melalui situs web milik organisasi pemerintah. Salah satu jenis informasi yang tersedia dalam sistem ini adalah produk hukum yang dikenal dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pembentukan JDIH dilatarbelakangi oleh keunggulan teknologi internet dalam menyediakan akses informasi yang cepat dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Jika sebelumnya distribusi dokumen hukum dilakukan melalui buku cetak atau media fisik lainnya yang terbatas oleh jarak dan waktu, maka dengan kehadiran JDIH, informasi hukum dapat diakses secara real-time oleh berbagai pihak yang membutuhkan (Haryanto, 2011 dalam Pramono, 2015).

Informasi yang diunggah ke dalam sistem JDIH secara otomatis terdokumentasi dalam bentuk arsip digital, sehingga lebih aman dan tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik yang besar. Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang JDIH, yakni Keputusan Presiden (Keppres) No. 91 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Peraturan tersebut menegaskan bahwa JDIH bertujuan untuk mendayagunakan dan memanfaatkan dokumen hukum dalam satu sistem terpadu yang dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat serta memberikan layanan informasi hukum yang akurat, cepat, mudah, dan lengkap. Dengan adanya JDIH, diharapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih sistematis dapat terjamin, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional serta pelayanan publik.

Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem JDIH Kemendikbudristek dikembangkan sebagai wadah dokumentasi hukum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pendayagunaan bersama atas berbagai dokumen hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara tertib, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, sistem ini berperan dalam memberikan layanan informasi hukum yang lengkap, mudah, cepat, dan akurat bagi pemangku kepentingan. JDIH Kemendikbudristek dibangun untuk mendukung sebagian tugas pokok Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya dalam mendokumentasikan dan menyebarkan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan serta produk hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut.

State of the Art

Penelitian yang diusulkan dalam pengembangan sistem informasi JDIH perlu didukung oleh rujukan dari penelitian terdahulu guna memastikan relevansi dan kontribusi akademik yang jelas. Pemahaman terhadap penelitian sebelumnya juga penting untuk menghindari plagiarisme serta menilai keunikan dan keunggulan pendekatan yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang telah dilakukan dengan berbagai objek dan metode, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Intisari
1	Rahman (2016)	Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Melalui Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dengan membuka akses publik menggunakan teknologi informasi yang tertata dengan baik, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termotivasi untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat dalam suatu jaringan dokumentasi hukum yang terpadu serta berupaya meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat demi supremasi hukum.
2	Pramono (2015)	Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur	Penelitian ini mengevaluasi penyelenggaraan JDIH Pemerintah Daerah di Jawa Timur dengan menelaah dua aspek utama, yaitu prioritas produk hukum daerah yang ditampilkan serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur jumlah dan jenis dokumen yang

			dipublikasikan serta menganalisis pembaruan data pada situs web pemerintah daerah.
3	Wardani & Hafidz (2017)	Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Publik	Studi ini meneliti pengembangan JDIH Provinsi Jawa Tengah, mengidentifikasi kendala yang menghambat optimalisasi sistem, serta mengusulkan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem dokumentasi hukum sebagai sarana pendukung perumusan kebijakan publik di tingkat provinsi.
4	Handoko, Lestariningsih, & Ardhianto (2014)	Rancang Bangun Sistem Informasi Data Konsultasi Perkara Klien pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang	Penelitian ini berfokus pada pembangunan sistem informasi berbasis web untuk administrasi dan pengarsipan dokumen di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Stikubank. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem berbasis web meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan konsultasi hukum serta memperluas cakupan layanan hukum bagi masyarakat.
5	Dzuja & Sismoro (2013)	Rancang Bangun Sistem Regulations Legislation Library di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Menggunakan Embarcadero Delphi Xe3	Sistem Regulation Legislation Library yang dikembangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengefektifkan kinerja staf bagian perpustakaan DPRD Kabupaten Jombang dalam pendataan anggota serta transaksi peminjaman pustaka. Sistem ini juga mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan atau hilangnya dokumen fisik.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi JDIH berbasis digital memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen hukum. Beberapa studi berfokus pada pengembangan JDIH di tingkat pemerintah daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2016) dan Pramono (2015), sementara studi lain, seperti yang dilakukan oleh Handoko et al. (2014), lebih menyoroti penerapan sistem dokumentasi hukum di lingkungan akademik dan institusi hukum.

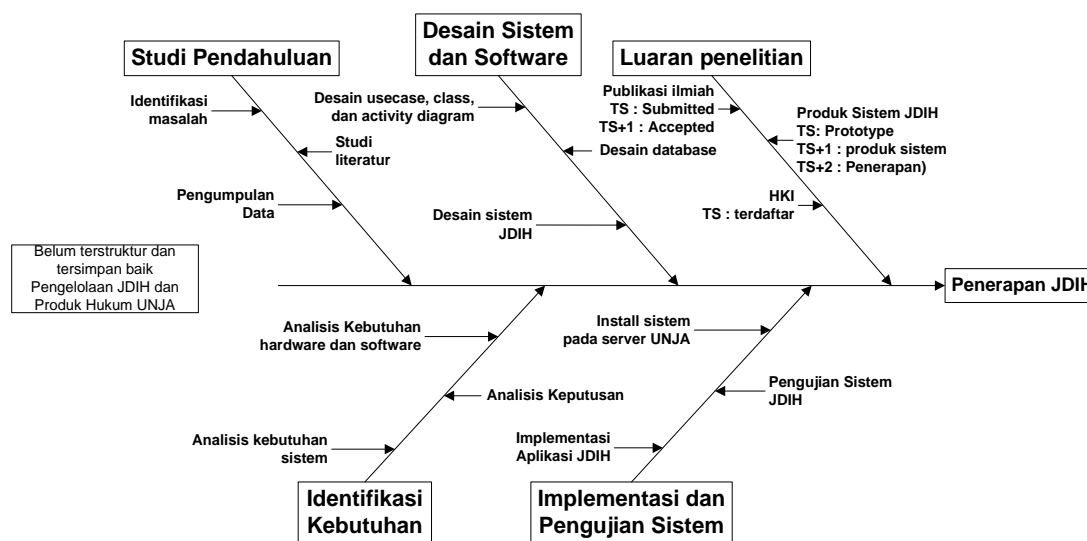
Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan dalam pengembangan JDIH berbasis teknologi informasi, masih terdapat peluang untuk melakukan inovasi dalam sistem ini, khususnya dalam konteks perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi JDIH berbasis web di Universitas Jambi, yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi hukum internal tetapi juga mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan efisiensi birokrasi di lingkungan akademik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan perencanaan yang matang, mengikuti prosedur yang disusun secara logis dan sistematis agar hasil yang diperoleh dapat mewakili kondisi sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan (Britton & Doake, 2001). Dalam pengembangan aplikasi Feeder, metode yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD). RAD merupakan salah satu model proses pembangunan perangkat lunak yang termasuk dalam teknik incremental (bertingkat). Model ini menekankan pada siklus pembangunan yang pendek, singkat, dan cepat, dengan batasan waktu sebagai salah satu aspek penting dalam implementasinya.

RAD menggunakan pendekatan iteratif (berulang) dalam proses pengembangan sistem, di mana working model atau model kerja sistem dikonstruksikan sejak tahap awal pengembangan untuk menetapkan kebutuhan (requirement) pengguna. Model kerja ini tidak digunakan secara langsung dalam sistem akhir, melainkan sebagai referensi dalam perancangan dan implementasi sistem yang lebih matang. Dengan pendekatan ini, pengembangan aplikasi dapat dilakukan lebih fleksibel, memungkinkan revisi dan perbaikan secara terus-menerus sebelum mencapai tahap finalisasi sistem (Britton & Doake, 2001).

Untuk mendukung pengembangan aplikasi ini, tahapan-tahapan dalam metode RAD dirangkum dalam fishbone diagram yang disajikan pada Gambar 1. Fishbone diagram digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pengembangan sistem. Diagram ini membantu dalam menguraikan potensi permasalahan serta mengembangkan solusi yang tepat guna memastikan sistem yang dibangun memenuhi standar yang diharapkan.



Gambar 1. Fishbone Diagram

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rancangan Sistem

1. Pendokumentasian

Sistem informasi jaringan dokumen dan informasi hukum (e-JDIH) dalam rangka transformasi digital pengelolaan dokumen produk hukum dan keterbukaan informasi di Universitas Jambi berbasis web merupakan suatu aplikasi yang menyediakan informasi bagi user mengenai digitalisasi dokumen, penyimpanan, pencarian data dan pengarsipan dokumen produk hukum yang dikeluarkan oleh Universitas Jambi dan keterbukaan

informasi secara online digital dalam hal ini berbasis web. Dengan adanya Sistem informasi JDIIH ini ekspektasinya dapat membantu pimpinan Universitas dan civitas akademika mendapatkan akses dan kemudahan mendapatkan data tentang dokumen-dokumen produk hukum yang dihasilkan oleh Universitas Jambi. Dokumen produk hukum yang dimaksud antara lain:

1. Dokumen Peraturan Perundangan-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Instruksi Pemerintah, Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, Instruksi Dirjen, Keputusan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan yang sejenisnya.
2. Dokumen Statuta, OTK, Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, Instruksi Rektor dan yang sejenisnya.
3. Dokumen Visi, Misi, Rencana Strategis, Rencana Operasional, Program Kerja Universitas dan Jajarannya beserta dokumentasi proses penyusunannya.
4. Dokumen dan Dokumentasi Kerjasama (MoU) yang dijalin oleh Universitas Jambi
5. Dokumen dan Dokumentasi penyusunan Kurikulum di lingkungan Universitas Jambi
6. Dokumen Borang Akreditasi Institusi dan Prodi serta Sertifikat Akreditasi di lingkungan Universitas Jambi
7. Dokumen Penjaminan Mutu Akademik Universitas
8. Dokumen SOP SOP, Instruksi Kerja maupun dokumen pendukung lainnya.
9. Dokumen Peraturan, Kebijakan dan Surat Keputusan yang berkenaan dengan baik SK Pendirian Universitas, Fakultas, Prodi, Penerimaan Pegawai maupun SK pendukung lainnya di lingkungan Universitas Jambi.

2. Aturan Bisnis

Berdasarkan kebutuhan fungsional sistem dan non fungsional sistem, maka aturan bisnis dalam Sistem Informasi JDIIH Universitas Jambi adalah sebagai berikut:

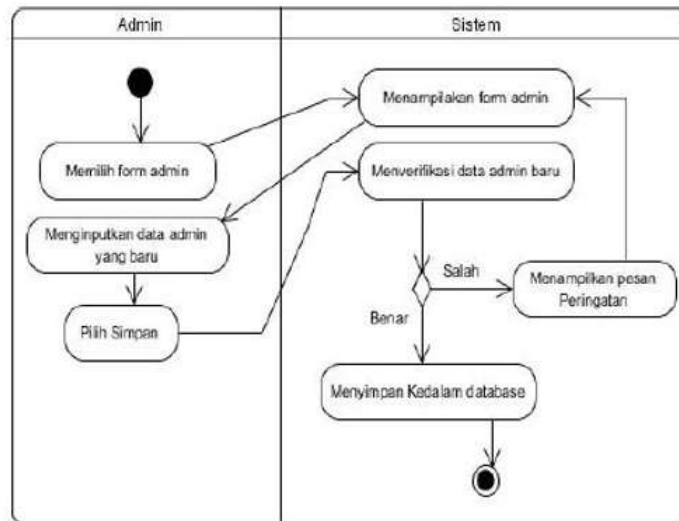
1. *users* dalam Sistem Informasi JDIIH Universitas Jambi yang terdiri dari admin dan civitas akademika.
2. Admin dapat mengelola data admin dan data dosen/tenaga kependidikan beserta hak aksesnya pada sistem, mengelola dan mengunggah seluruh yang menjadi output pada aplikasi JDIIH.
3. Civitas Akademikan hanya bisa mengakses dan mengunduh dokumen produk hukum yang telah diunggah.
4. Sebelum melakukan pengolahan informasi *users* harus *login* ke sistem dengan menggunakan *username* dan *password*.

B. Activity Diagram

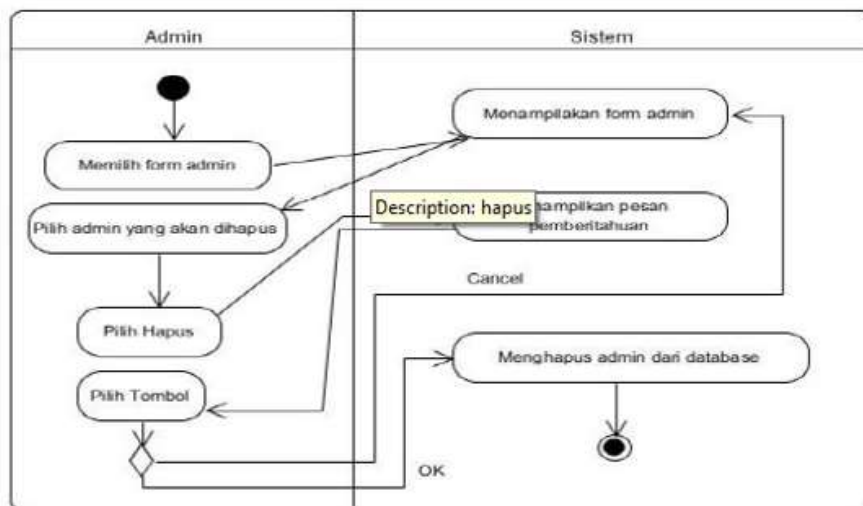
Diagram aktivitas atau *activity diagram* menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem.

1. Kelola menu Data Admin

Activity Diagram kelola menu data admin fakultas ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 menjelaskan aktivitas sistem saat mengedit data admin.



Gambar 2. Menambah data admin



Gambar 3. Menghapus data admin

Dari *activity diagram* di atas untuk mengelola menu yang lainnya seperti mengelola data dosen dan tenaga kependidikan, *users* harus memilih menu sesuai dengan nama yang akan di kelola pada menu serta alurnya sama dalam melakukan aksi tambah, ubah dan hapus dengan aksi dalam tambah, ubah dan hapus pada data admin.

3. Kelola Dokumen

Activity diagram kelola dokumen ditunjukkan pada Gambar 4 hingga Gambar 6 menjelaskan aktivitas sistem saat menambah, menghapus, meng-*upload* dan *edit* dokumen.

sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan dari analisis kebutuhan sistem yang dibutuhkan maka diambil keputusan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi jaringan dokumen dan informasi hukum Universitas Jambi dalam rangka transformasi digital pengelolaan dokumentasi produk hukum dan keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan berbasis web agar mudah diakses oleh user di manapun ia berada dengan syarat terkoneksi jaringan internet
2. Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework laravel, dan didukung oleh bahasa pemrograman lainnya seperti CSS, javascript dll serta Aplikasi memuat kebutuhan sistem baik secara fungsional maupun secara non fungsional.
3. Berdasarkan hasil analisis, pengguna dari sistem yang akan dibuat adalah admin (bagian Hukum dan Tata Laksana Kepegawaian Universitas Jambi) dan Civitas Akademika (Dosen, tendik dan mahasiswa).
4. Aplikasi Memuat kebutuhan sistem sebagai berikut:
 - a) Kebutuhan Fungsional Sistem
 1. Admin

Fungsionalitas sistem untuk Admin adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab/Kebutuhan	Kebutuhan Data	Kebutuhan Informasi	Outout
Melakukan Unggah dan pengelolaan data, dokumentasi produk hukum	Peraturan perundangan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, peraturan dirjen, keputusan pemerintah, keputusan Menteri, keputusan dirjen, Profil Universitas, Visi dan Misi Universitas	Informasi produk hukum Publikasi produk hukum	peraturan rektor, keputusan rektor, SOP Universitas, Kebijakan Universitas, Pedoman, Instruksi Rektor, Renstra, Renop dan Program Kerja Universitas

2. Civitas Akademika

Fungsionalitas sistem untuk civitas akademika adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab/Kebutuhan	Kebutuhan Data	Kebutuhan Informasi	Outout
Melakukan unduh data, dokumentasi produk hukum	Peraturan perundangan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, peraturan dirjen, keputusan pemerintah, keputusan Menteri, keputusan dirjen, Profil Universitas, Visi dan Misi Universitas	Informasi produk hukum Publikasi produk hukum	peraturan rektor, keputusan rektor, SOP Universitas, Kebijakan Universitas, Pedoman, Instruksi Rektor, Renstra, Renop dan Program Kerja Universitas, Regulasi yang sejenis

b) Kebutuhan non fungsional sistem

Berdasarkan kebutuhan fungsional sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem yang dirancang memiliki hal-hal berikut :

1. *Usability*

Aplikasi memiliki rancangan antar muka sistem yang mudah digunakan oleh user.

2. *Functionality*

- a. Mempermudah akses informasi.
- b. Sistem dapat diakses dalam 24 jam sehari

3. *Security*

- a. *User* diberi *username* dan *password*
- b. Dokumen-dokumen arsip hanya dapat diolah oleh user

4. *Flexibility*

- a. Kemudahan dalam mencari dokumen yang dibutuhkan dikarenakan pengorganisasian dokumen yang baik.
- b. Kemudahan setiap akan mencetak dan mendownload dokumen karena dokumen arsip sudah terintegrasi dengan baik.

5. Aplikasi di install pada server Universitas Jambi dengan alamat sebagai berikut <https://jdih.unja.ac.id>.

D. *Implementasi Sistem*

Dalam implementasi Aplikasi JDIH Universitas Jambi dapat ditampilkan berdasarkan akses yang diberikan. Berikut penjelasan dari tampilan implementasi yang telah dilakukan.

1. Akses ke <https://legalhukum.unja.ac.id>

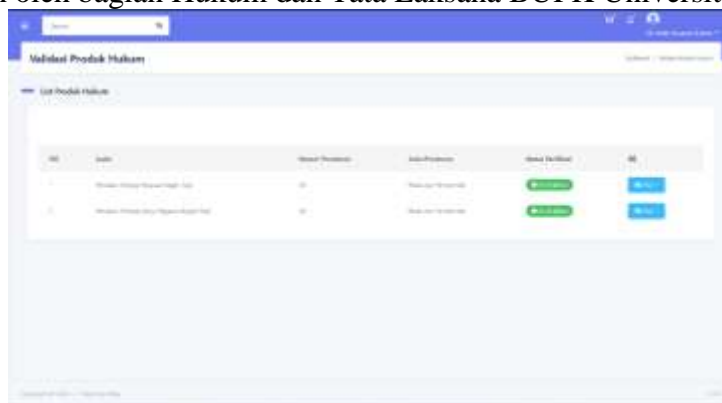
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Berikut tampilannya pada Gambar 7.



Gambar 7. Halaman awal web JDIH UNJA

Gambar 10. Tampilan halaman untuk membuat data produk hukum di JDIH UNJA

5. Halaman Validasi produk hukum, halaman ini berisi proses validasi dari produk hukum yang diinputkan. Proses ini perlu dilakukan untuk melakukan pengecekan kebenaran dari produk hukum yang ditambahkan oleh operator. Proses validasi ini dilakukan oleh bagian Hukum dan Tata Laksana BUPK Universitas Jambi.



Gambar 11. Tampilan halaman untuk melakukan validasi data produk hukum di JDIH UNJA

6. Halaman Jenis Produk Hukum



Gambar 12. Tampilan halaman jenis dokumen produk hukum di JDIH UNJA

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis web telah berhasil dikembangkan di Universitas Jambi sebagai sarana layanan informasi hukum yang mudah, cepat, dan akurat.
2. Aplikasi ini telah selesai diimplementasikan dan dapat diakses melalui laman <https://legalthukum.unja.ac.id>.
3. Penginputan, pengelolaan, dan penyajian data produk hukum menjadi lebih sistematis dan efisien.
4. Aplikasi mendukung peningkatan transparansi dan efektivitas tata kelola dokumen hukum di lingkungan universitas.
5. Seluruh pemangku kepentingan kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap dokumen hukum yang relevan.

Saran

Untuk mengoptimalkan manfaat aplikasi JDIH Universitas Jambi, perlu dilakukan pengembangan lanjutan seperti penambahan fitur pencarian lanjutan, pelacakan dokumen,

dan notifikasi pembaruan. Integrasi dengan sistem informasi universitas juga dapat memperkuat fungsi tata kelola hukum. Dari sisi keamanan, proteksi data perlu ditingkatkan melalui autentikasi berbasis enkripsi. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan bagi pengguna serta evaluasi dan pemeliharaan berkala penting dilakukan guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, W. B., Widodo, A. P., & Adi, K. (2022). Penerapan tata kelola teknologi informasi pada instansi: Systematic literature review. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 7(3), 191–198. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i3.2021.191-198>
- Asgart, S. M. (2011). Keterbukaan informasi publik dalam perspektif governability. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 3(1), 409. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/SMNAS/1609>
- Britton, C., & Doake, J. (2001). *Object-oriented systems development: A gentle introduction* (Illustrated ed.). McGraw-Hill. ISBN 9780077095444.
- Dzuja, B., & Sismoro, H. (2013). Rancang bangun sistem regulations legislation library di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menggunakan Embarcadero Delphi XE3. *Jurnal Ilmiah DASI*, 14(4), 6–10.
- Edy, S. S. (2017). Independensi sistem peradilan militer di Indonesia (Studi tentang struktur peradilan militer). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 105–128. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.105-128>
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Handoko, W. T., Lestariningsih, E., & Ardianto, E. (2014). Rancang bangun sistem informasi data konsultasi perkara klien pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang. *Dinamika Informatika*, 6(1), 17–26.
- Herawati, A. R., Widowati, N., & Maesaroh, M. (2023). Dynamics of public service digitization: Study on case tracing information system (SIPP) in court. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13568>
- Makarim, E. (2015). Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.60>
- Mudjiyanto, B. (2014). Operasional sistem perkantoran elektronik dan implementasi aspek human resources (Survei pejabat pemerintah tentang implementasi e-govt). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 17(1), 27. <https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170102>
- Pramono, D. (2015). Penyelenggaraan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1(1), 22–27.
- Putra, A. A., Kusriani, K., & Pramono, E. (2020). Analisis penerimaan penggunaan sistem informasi akademik/SISCA menggunakan UTAUT. *Jurnal Informa: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 40. <https://doi.org/10.46808/informa.v5i3.143>
- Putra, W. E., & Setiawan, D. (2019). The success analysis of implementation of the electronic system integrated final project of Jambi University students with Delone and McLean model approach. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.15548/jebi.v4i2.241>

- Rahman, I. (2016). Implementasi rencana jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(2), 106–113.
- Ripanti, E. F. (2020). Pengembangan model evaluasi pada integrated information systems di universitas: Systematic literature review. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 6(2), 224. <https://doi.org/10.26418/jp.v6i2.41258>
- Wardani, L. (2017). *Peran jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik (Analisis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)* [Tesis master, Fakultas Hukum UNISSULA].